





## MIMBAR ALAT KELENGKAPAN DEWAN DPRD KOTA YOGYAKARTA

KOMISIA  
FOKUS KAWAL BIDANG PEMERINTAHAN

### Wujudkan Yogya Nyaman, Penegakan Perda Tidak Boleh Berhenti

**YOGYA (KR)** - Predikat Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni menjadi tantangan untuk dapat terus dipertahankan. Terutama tantangan bagi para aparatur Pemerintah Kota Yogyakarta yang bertanggung jawab menjadi pelayan masyarakat. Komisi A DPRD Kota Yogyakarta yang fokus mengawal bidang pemerintahan pun salah satunya mendorong agar penegakan perda jangan sampai berhenti. Hal ini agar para pelanggar peraturan daerah mendapatkan efek jera dan potensi gangguan kamtibmas teratasi.

Sesuai ketugasannya di bidang pemerintahan, Komisi A DPRD Kota Yogyakarta memiliki mitra kerja yang paling banyak dibanding alat kelengkapan lainnya. Total terdapat 17 organisasi perangkat daerah (OPD) di tingkat Pemkot maupun instansi vertikal. Saat ini tiga unsur

pimpinan yang mengawangi Komisi A ialah Wisnu Sabdono Putro SH sebagai ketua, Indaruwanto Eko Cahyono selaku wakil ketua, dan Marwoto Hadi SH sebagai sekretaris.

Sepanjang tahun ini jajaran Komisi A juga kerap menggelar rapat kerja serta pengawasan bersama mitranya di lembaga eksekutif. Tujuannya agar urusan bidang pemerintahan mampu berjalan secara optimal, termasuk upaya penerbitan atas setiap bentuk pelanggaran supaya tidak ada kesan pembiaran. "Dukungan kepada Sat Pol PP untuk konsisten dalam mengawal penegakan perda terus kami berikan. Apapun itu ketika melanggar perda, harus ditindak," tandas Wisnu.

Oleh karena itu Sat Pol PP juga dituntut meningkatkan koordinasinya dengan OPD lain. Hal ini karena banyak perda yang

dijalankan oleh tiap OPD. Salah satunya dalam proses perizinan yang kini tengah menjadi sorotan publik. Setiap izin yang diterbitkan seharusnya sudah memenuhi seluruh unsur yang menjadi persyaratan. Ketika ada hal yang belum terpenuhi namun izin sudah keluar, maka Sat Pol PP bisa menjadi garda terdepan dalam menertibkan. "Jangan nanti malah aparat penegak hukum yang akhirnya turun tangan. Citra pemerintah

bisa tercoreng, padahal banyak pegawai yang sudah bekerja dengan baik," imbuh Wisnu.

Indaruwanto menambahkan, selain aspek penegakan perda, upaya pencegahan juga perlu digalakkan. Apalagi saat ini banyak kampung yang telah mendeklarasikan sebagai kampung panca tertib. Keberadaan kampung panca tertib bisa menjadi mitra pemerintah dalam mencegah terjadinya pelanggaran. Salah satu

panca tertib yang digulirkan ialah tertib lingkungan. Kota Yogyakarta saat ini masih dihadapi dengan persoalan pelik mengenai sampah sebagai dampak overloaddnya TPA Piyungan. Dengan begitu kampung panca tertib bisa dilibatkan dalam sosialisasi di wilayahnya perihal pemilahan sampah di lingkup keluarga.

Begitu pula unsur ketertiban lain seperti tertib usaha, tertib daerah milik jalan, tertib sosial dan ter-

hadapi tahun politik. Sedikitnya ada empat OPD yang memiliki peran sentral. Yakni Inspektori dalam mengawasi dan memastikan netralitas para ASN, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyiapkan data pemilih, Sat Pol PP dalam menertibkan alat peraga dan menjaga kamtibmas, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mendukung pemilu damai dan demokratis.

Sementara Marwoto berharap sinergitas antara lembaga dewan dengan eksekutif dapat terus ditingkatkan. Pihaknya sudah berkomitmen untuk mengawal urusan pemerintahan agar berjalan secara optimal. Sehingga ketika terjadi persgalan, dapat sesegera mungkin dikordinasikan bersama supaya menghasilkan solusi bagi kemashlahatan orang banyak tanpa melanggar aturan. (Dh) f



**Wisnu Sabdono Putro SH**



**Indaruwanto Eko Cahyono**



**Marwoto Hadi SH**



**Rapat kerja Komisi A bersama mitranya di eksekutif.**



**Rapat kerja Komisi A bersama mitranya di eksekutif.**



**Rapat kerja Komisi A bersama mitranya di eksekutif.**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005